

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses pembangunan ekonomi suatu wilayah merupakan aspek yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebab mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan sebagainya. Namun, sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis di mana suatu wilayah terdapat kesenjangan antar berbagai sektor ekonomi yang dapat memperburuk ketidakmerataan pembangunan. Dengan adanya ketidakmerataan ini wilayah yang lebih maju terus berkembang pesat sementara wilayah yang tertinggal mengalami stagnasi sehingga menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah kaya dan miskin semakin lebar, oleh karena itu untuk mencapai pembangunan yang inklusif perlu dilakukan upaya pemerataan distribusi sumber daya dan peluang ekonomi. Kegiatan ekonomi pada intinya adalah proses pemanfaatan input produksi untuk menghasilkan output yang pada akhirnya memberikan dampak kembali terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Fajri and Iriani 2022). Sebab setiap wilayah harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu wilayah terdapat permasalahan yang harus segera diatasi dalam proses pembangunan ekonomi di suatu wilayah yakni masalah ketenagakerjaan yang saat ini menjadi tantangan besar bagi upaya pemerataan hasil pembangunan. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja yang umumnya tumbuh lebih cepat daripada jumlah

kesempatan kerja yang tersedia jadi masalah utama di sektor ketenagakerjaan adalah terbatasnya jumlah kesempatan kerja (Akbar, Haerisma, and Suharto 2022).

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan kesempatan kerja, dengan memperluas akses dan kesempatan kerja lebih banyak individu akan dapat bekerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Pengangguran seringkali menjadi masalah utama dalam perekonomian karena keberadaannya dapat menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat memicu berbagai masalah sosial dan ekonomi (V. Tumilaar, Th. B. Maramis, and F. Dj. Siwu 2022). Masalah tersebut timbul akibat pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja yang sangat cepat akibat tidak seimbangnya penyediaan lapangan pekerjaan (Nurhardiansyah, Istiyani, and Prianto 2017). Berikut merupakan data kesempatan Kerja di Pulau Jawa pada tahun 2021-2023 :

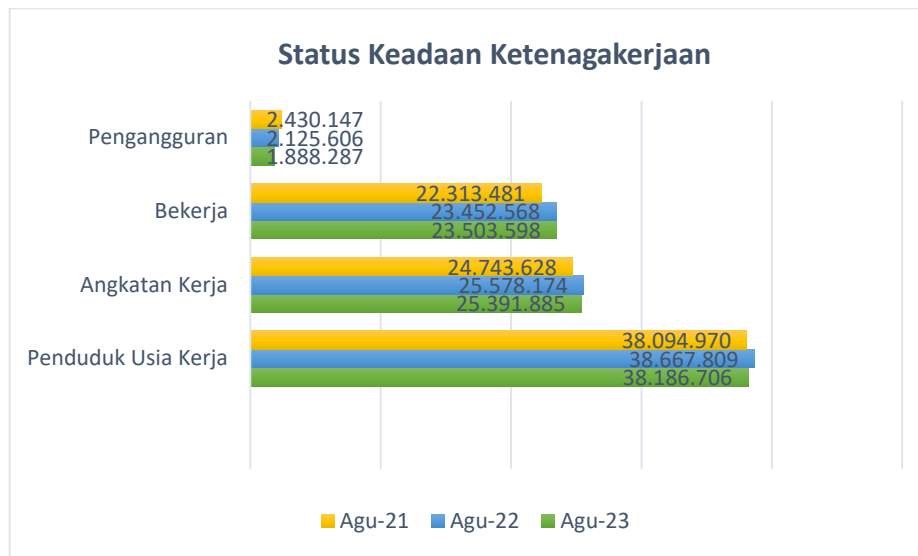
**Grafik 1. 1 Data Kesempatan Kerja di Pulau Jawa**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021-2023 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa tingkat kesempatan kerja di Pulau Jawa menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar provinsi. Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Barat mencatat tingkat kesempatan kerja tertinggi di Pulau Jawa yakni sebesar 23503598 yang selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir ini yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang beragam termasuk industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Meskipun memiliki kesempatan kerja yang tinggi di Pulau Jawa tetapi dalam 3 tahun terakhir ini Jawa Barat menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi yakni pada tahun 2021 mencatat 8,8% dan di tahun 2023 sebanyak 6,32%. Ketimpangan fenomena ini bisa disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan dan kompetensi angkatan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dengan lebih baik. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah penguatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi yang ada dengan memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan yang menitikberatkan pada perolehan keterampilan praktis. Selain itu, penting untuk meningkatkan akses informasi mengenai kesempatan kerja dan kebutuhan pasar kerja agar kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dapat dikurangi sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Sebagai hasil dari pembangunan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan masyarakat akan menjadi lebih sejahtera (Sadono Sukirno 2010). Berikut merupakan data ketenagakerjaan di Jawa Barat tahun 2021-2023:

**Grafik 1. 2 Status Keadaan Ketenagakerjaan**

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021-2023 (Data Diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kesempatan kerja di Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya berdasarkan jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2021 sebesar 38.094.970 mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 38.186.706 sementara itu beriringan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 sebanyak 24.743.628 terjadi peningkatan sebanyak 25.391.885 pada tahun 2023, yang dimana meskipun jumlah penduduk bekerja setiap tahunnya ikut meningkat dan jumlah pengangguran mengalami penurunan akan tetapi selalu diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Menurut (Sahil et al. 2023) peningkatan jumlah penduduk usia kerja menyebabkan peningkatan pasokan tenaga kerja, namun di sisi lain permintaan tenaga kerja belum mampu menyerap sepenuhnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, jika ini dibiarkan berlanjut maka angka pengangguran yang ada di Jawa Barat semakin tinggi, dengan angka pengangguran yang tinggi maka dapat

menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan baik bagi individu maupun perekonomian secara keseluruhan sehingga pemerintah harus terus melakukan upaya untuk menekan angka pengangguran seperti memperluas kesempatan kerja yang merata dan mengurangi ketimpangan yang ada.

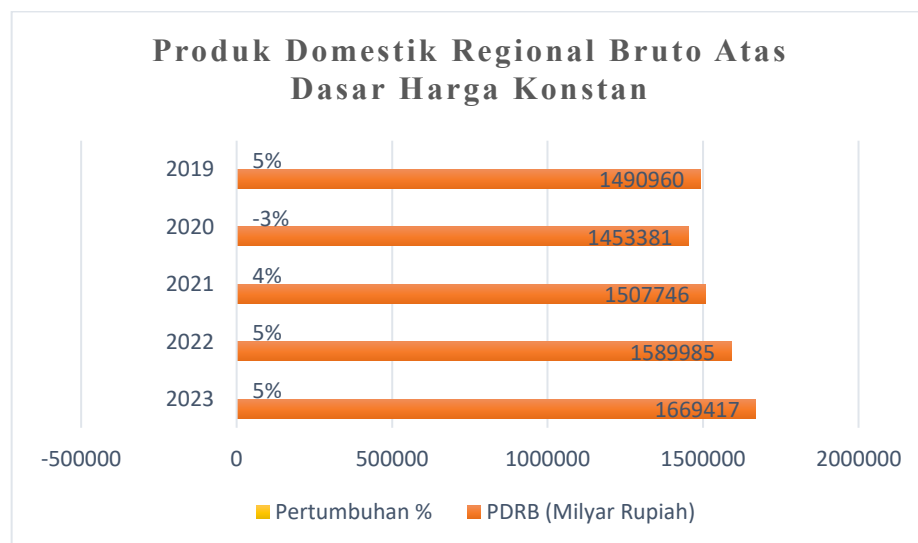
Determinan merupakan istilah yang mengacu pada berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap suatu fenomena tertentu yang menjadi penyebab atau penentu dari suatu peristiwa atau keadaan yang sedang dikaji termasuk dalam hal ini yakni kesempatan kerja. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung ketersediaan lapangan kerja sekaligus memastikan tenaga kerja yang tersedia dapat terserap dengan baik di pasar kerja. Dalam penelitian ini faktor-faktor tersebut meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah (RLS), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi di suatu daerah sehingga peningkatan produk nasional bruto dapat mendorong perluasan lapangan pekerjaan. Jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup besar namun hal tersebut perlu diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang seimbang agar tidak terjadi masalah kemiskinan. RLS yang merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia berperan dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja. Selain itu UMP sebagai standar upah minimum juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.

Laju peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat dijadikan salah satu indikator utama untuk mengukur

pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Peningkatan kuantitas produk dan jasa akan mendorong bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dapat terserap (Harits and Nurhayati 2024). Melalui analisis PDRB dapat diketahui bahwa wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung menciptakan lebih banyak kesempatan kerja akan tetapi penting untuk mempertimbangkan bahwa peningkatan PDRB tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan kerja.

Pendapatan per kapita atau PDRB merupakan tujuan pembangunan ekonomi yaitu suatu proses dimana pendapatan per kapita riil meningkat secara terus menerus dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang, baik dalam struktur ekonomi (yang makin modern) maupun dalam distribusi kekayaan, sikap, persepsi, regulasi, kesejahteraan, kebijakan, dan lain-lain (Trianto 2017). Berikut merupakan data PDRB di Jawa Barat tahun 2019-2023:

**Grafik 1. 3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019-2023 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 perkembangan produk domestik bruto di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang mencerminkan dinamika perekonomian daerah. Pada tahun 2019 tercatat produk domestik bruto sebesar 1.490.960 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 5%. Namun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar -3% akibat dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada hampir seluruh sektor perekonomian. Tetapi pada tahun berikutnya PDRB Jawa Barat kembali pulih dan tumbuh sebesar 4% pada tahun 2021 serta kembali mencapai 5% pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan PDRB yang terus berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi yang signifikan yang diharapkan dapat mendorong terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan. Oleh karena itu perlu analisis mendalam tentang dampak pertumbuhan PDRB terhadap kesempatan kerja bertujuan untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi regional dan dinamika pasar tenaga kerja yang berpotensi pada peningkatan kesempatan kerja.

Sebagai salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi jumlah penduduk juga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kapasitas penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Menurut teori ekonomi klasik Adam Smith peningkatan output ekonomi sangat bergantung pada jumlah tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu pertumbuhan jumlah penduduk dapat mempengaruhi potensi tenaga kerja yang tersedia secara signifikan yang pada gilirannya akan mempengaruhi dinamika perekonomian suatu daerah. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 bahwa Jawa Barat adalah provinsi urutan pertama dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia

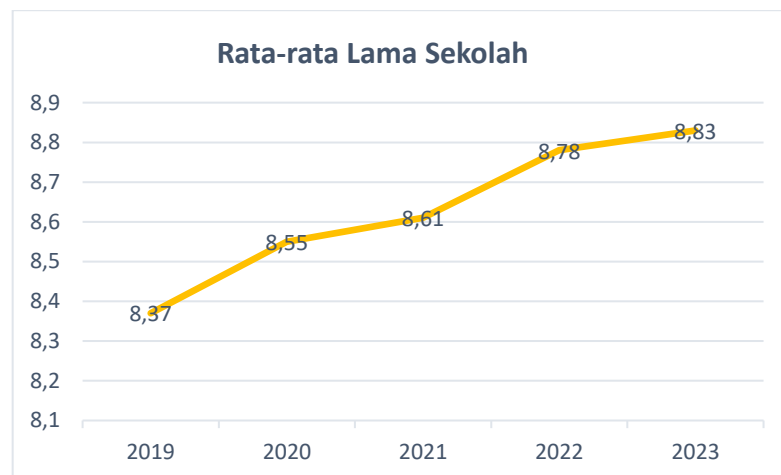
yaitu sebanyak 49.860. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar Jawa Barat tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi tetapi juga menghadapi tantangan besar untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi tenaga kerja yang terus bertambah, jumlah penduduk merupakan faktor terpenting dalam penyediaan tenaga kerja peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung pada jumlah tenaga kerja yang tersedia (Sahil et al. 2023).

Di samping itu, pentingnya tingkat pendidikan dalam mempengaruhi kesempatan kerja di suatu daerah tidak boleh diremehkan. Apabila sistem pendidikan suatu negara tidak dapat berkembang dengan baik maka pembangunan negara tersebut akan terhambat (Guna and Yuliarmi 2021). Sebab rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai penduduk suatu daerah. Rata-rata lama sekolah yang tinggi mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik dan berdaya saing dan tenaga kerja yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus mengurangi angka pengangguran (Muna et al. 2024).

Semakin tinggi Rata-rata Lama Sekolah di suatu daerah semakin tinggi pula keterampilan dan kemampuan tenaga kerja yang dimilikinya yang berdampak pada kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh pada menurunnya kualitas dan kuantitas output dalam proses produksi yang pada akhirnya berdampak pada minimnya kesempatan kerja yang tersedia (Tri Rezeki and Rita Indrawati 2022). Oleh karena itu perlu memiliki pendidikan yang tinggi untuk meningkatkan keterampilan teknis, keterampilan berpikir kritis, dan pemecahan masalah yang semakin dibutuhkan dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Sehingga untuk

memaksimalkan potensi angkatan kerja terdidik di Jawa Barat kebijakan pembangunan ekonomi dan pendidikan penting untuk menghubungkan sektor pendidikan lebih erat dengan sektor ketenagakerjaan. Berikut merupakan data Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Barat tahun 2019-2023:

**Grafik 1. 4 Rata-rata lama sekolah**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019-2023 (Data Diolah)

Dari grafik diatas terlihat bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) di Jawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan yang tercermin dari peningkatan akses dan mutu pendidikan di daerah tersebut. Pada tahun 2019, RLS tercatat sebesar 8,37 tahun kemudian meningkat menjadi 8,55 tahun pada tahun 2020. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2021 RLS mencapai 8,61 tahun. Pada tahun 2022 RLS meningkat lagi menjadi 8,78 tahun dan mencapai 8,83 tahun pada tahun 2023. Peningkatan RLS ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia di Jawa Barat telah meningkat yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Namun meskipun RLS meningkat tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyelaraskan pendidikan yang diperoleh dengan kebutuhan pasar

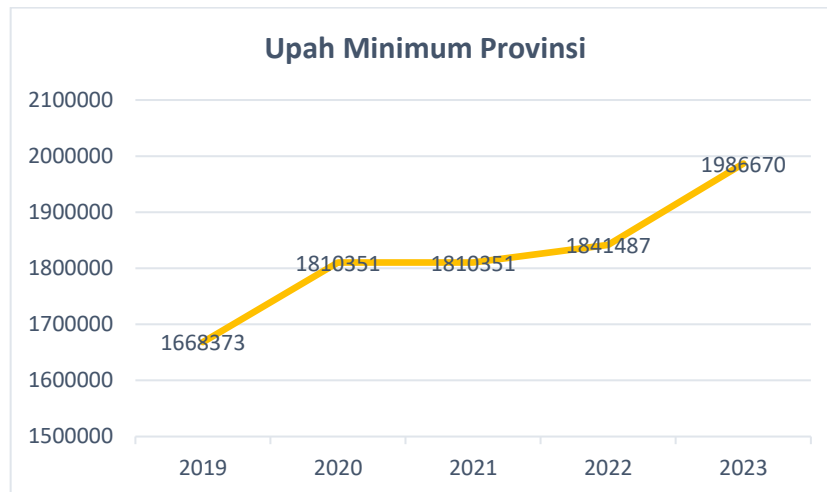
tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Diharapkan dengan meningkatnya mutu pendidikan akan tercipta lebih banyak lagi tenaga kerja terampil yang siap memasuki pasar kerja dan mendukung terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas di Jawa Barat.

Adapun hal lain yang mempengaruhi kesempatan kerja di Jawa Barat yakni mengenai upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja tujuannya untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dapat mendorong kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Akan tetapi seringkali menimbulkan dampak yang kompleks terhadap pasar tenaga kerja seperti jika terdapat kenaikan UMP maka dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya beli mereka sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi namun disisi lain, penetapan UMP yang terlalu tinggi dapat membebani pelaku usaha terutama industri kecil dan menengah yang pada akhirnya bisa mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap. Dengan kata lain, setiap peningkatan upah minimum berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap (Nur Wulansari, Imaningsih, and Wijaya 2021).

Untuk itu penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah pusat namun pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Hal ini menyebabkan perbedaan upah minimum di setiap daerah karena disesuaikan dengan biaya hidup dan kondisi ekonomi setempat tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga sambil mempertimbangkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan lapangan kerja. Tinggal di kota besar biasanya diikuti dengan

meningkatnya biaya hidup, biaya hidup ini menjadi acuan dalam menetapkan "batas minimum upah" yang diterima oleh para pekerja (Rahmawati 2013). Berikut merupakan data Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Barat tahun 2019-2023:

**Grafik 1. 5 Upah Minimum Provinsi**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019-2023 (Data Diolah)

Grafik data diatas menunjukkan dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat. Pada tahun 2019 UMP Jawa Barat sebesar Rp1.668.373, kemudian meningkat menjadi Rp1.810.351 pada tahun 2020. Nilai tersebut tetap stabil hingga tahun 2021 kemudian meningkat lagi menjadi Rp1.841.487 pada tahun 2022 dan Rp1.986.670 pada tahun 2023. Kenaikan UMP ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menyesuaikan daya beli pekerja dengan inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat. Namun, meskipun kenaikan UMP dapat membuatnya lebih menarik bagi pekerja akan tetapi hal tersebut juga dapat memengaruhi penyerapan pekerja terutama pada sektor-sektor yang margin keuntungannya rendah. Kenaikan UMP yang terlalu tinggi dalam waktu singkat dapat menyulitkan perusahaan untuk menyerap lebih banyak pekerja karena biaya

produksi yang meningkat. Oleh karena itu menganalisis hubungan antara kenaikan UMP dan kesempatan kerja sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja tanpa memberikan beban yang lebih besar pada sektor tertentu.

Peningkatan PDRB, jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum memiliki potensi dalam memengaruhi kesempatan kerja di Jawa Barat. Dengan meningkatnya pertumbuhan PDRB diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, di sisi lain jumlah penduduk yang tinggi di Jawa Barat juga menjadi tantangan besar agar kesempatan kerja yang ada dapat merata sebab tingkat jumlah penduduk berdampak pada tingkat tenaga kerja yang tersedia. Peningkatan rata-rata lama sekolah berdampak langsung terhadap kesempatan kerja yang ada karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar yang tersedia. Sementara itu kenaikan upah minimum memberikan dampak yang kompleks sebab jika upah minimum naik maka kesejahteraan pekerja meningkat akan tetapi dapat membebani pelaku usaha dengan margin keuntungan yang rendah. Meski faktor-faktor ini telah dibahas secara terpisah dalam penelitian sebelumnya namun, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis keempat variabel ini secara simultan dalam memengaruhi kesempatan kerja di Jawa Barat. Kesenjangan penelitian ini menjadi penting untuk diteliti guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh serta mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan di Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian guna menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja di Jawa Barat, peneliti akan memfokuskan analisis

pada berbagai variabel yang dapat menjadi determinan kesempatan kerja termasuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum provinsi. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Determinan Kesempatan Kerja Di Jawa Barat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat?
3. Apakah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat?
4. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini menganalisis determinan kesempatan kerja sebagai variabel dependen menggunakan data sekunder atau time series dalam kurun waktu selama 14 tahun yaitu dari tahun 2010-2023 di Jawa Barat. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang mencerminkan potensi dan tantangan angkatan kerja, rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai ukuran kualitas pendidikan, dan upah minimum provinsi (UMP) yang mewakili standar upah untuk kesempatan kerja.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan perekonomian ke depan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Lembaga/Universitas

Sebagai bahan kajian dan referensi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur mengenai faktor-faktor penentu kesempatan kerja di Provinsi Jawa Barat.

### 3. Bagi Peneliti

Sebagai referensi dan informasi yang dapat digunakan untuk dijadikan bahan acuan mengenai topik serupa untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pembanding untuk penelitian lain.